

**Kepemimpinan Ideal Umar bin Abdul Aziz dan Relevansinya Terhadap Konsep Pemerintahan Modern
(Studi Analisis Pemikiran Fahruddin Faiz)**

**The Ideal Leadership of Umar bin Abdul Aziz and Its Relevance to The Concept of Modern Governance
(Analytical Study of Fahruddin Faiz Thought)**

M. Anzaikhan

Institut Agama Islam Negeri Langsa
email: m.anzaikhan@iainlangsa.ac.id

Fitri Idani

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
email: fitriidani74@gmail.com

Abstrak

Secara historis, Islam melahirkan banyak pemimpin yang luar biasa salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz. Adapun pemikir modern yang intens membahas konsep kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah Khairuddin Faiz. Menurut Khairuddin Faiz, Umar bin Abdil Azis adalah sosok pemimpin ideal yang menawarkan berbagai konsep kepemimpinan secara implementatif. Hal tersebut terlihat dalam karakter dan kebijakan Umar bin Abdul Azis ketika menjadi pemimpin umat Islam (khalifah) pada masanya. Meskipun hanya menjabat dalam durasi waktu yang singkat, pemerintahan Umar bin Abdul Azis sangat berdampak signifikan, dan membawa kesejahteraan terhadap masyarakat. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Adapun metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif terhadap pemikiran Khairuddin Faiz. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menjadi pemimpin ideal sebagaimana yang dipraktekkan oleh Umar bin Abdul Aziz terdiri oleh berbagai aspek, diantaranya; Pemimpin harus ditunjuk bukan menunjuk diri, pemimpin mendatangi ulama sebagai penasehat, pemimpin harus bersikap egaliter, pemimpin bersikap wira'i, dan pemimpin mendedikasikan harta untuk umat bukan menimbun harta.

Kata Kunci: *Pemimpin Ideal, Umar bin Abdul Aziz, Khairuddin Faiz*

Abstract

Historically, Islam gave birth to many extraordinary leaders, one of which was Umar bin Abdul Aziz. The modern thinker who intensely discusses the leadership concept of Umar bin Abdul Aziz is Khairuddin Faiz. According to Khairuddin Faiz, Umar bin Abdil Azis is an ideal leader who offers various leadership concepts in an implementable manner. This can be seen in the character and policies of Umar bin Abdil Azis when he became the leader of the Muslims (caliphate) in his time. Even though he only served for a short time, the government of Umar bin Abdil Azis had a very significant impact, and brought prosperity to the community. This article belongs to literature research with a qualitative approach. The methodology used is a descriptive analysis study of Khairuddin Faiz's thoughts. The results of the study conclude that being an ideal leader as practiced by Umar bin Abdil Azis consists of various aspects, including; Leaders must be appointed not self-appointed, leaders come to scholars as advisors, leaders must be egalitarian, leaders must be wira'i, and leaders dedicate wealth to the people instead of hoarding wealth.

Keywords: *Ideal Leader, Umar bin Abdul Aziz, Khairuddin Faiz*

A. Pendahuluan

Berbicara kepemimpinan, Islam termasuk ajaran yang cukup serius dalam membahas fenomena tersebut. Tidak hanya mengkaji dalam format umum, bahkan Islam dengan jelas menginformasikan pentingnya kepemimpinan dalam berbagai konteks, baik itu pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam organisasi, pemimpin dalam agama, bahkan pemimpin diri sendiri (R. Wahyuni, 2019). Islam juga menyebutkan batas-batas kepemimpinan, termasuk di dalamnya bagaimana konsep dan kedudukan perempuan sebagai pemimpin. Sejarah telah menjadi bukti, begitu banyak catatan kepemimpinan baik yang termaktub dalam Al-Qur'an, hadis, atau catatan para pemikir Islam.

Seiring berkembangnya zaman, gaya dan model kepemimpinan semakin bergeser dengan nilai-nilai yang digariskan dalam Islam. Tidak hanya pada era modern seperti saat ini, bahkan pada zaman sahabat sekalipun keunikan-keunikan semakin berkembang sehingga tidak bisa disamakan lagi antara apa yang diajarkan Rasulullah dengan hal-hal baru yang datang kemudian (S. Wahyuni, 2021). Belum lagi ketika konsep dan mazhab keislaman semakin terkotak-kotak pascakepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Menjadikan standarisasi kepemimpinan Islam lambat laut meninggalkan porosnya sesuai kebutuhan politis.

Umar bin Abdul Azis adalah salah satu pemimpin dalam khazanah Islam yang sangat populer hingga saat ini. Beberapa penulis bahkan meyakini bahwa apa yang diimplementasikan Umar adalah model kepemimpinan Islam yang patut dijadikan rujukan dan panutan. Salah satu buktinya, adalah ‘kesejahteraan’ yang lahir pada masa kepemimpinannya walau berkuasa dalam waktu yang sangat singkat (Sali, 2019). Bila indikator dari kesejahteraan itu adalah ‘bangsa’ dan ‘masyarakat’, bagaimana jika seorang pemimpin itu sendiri mengalami kesulitan (penggerusan) demi bangsanya. Apakah konsep seperti itu disebut dengan idealitas atau mungkin ada jalan lain yang dapat memberikan tawaran yang lebih baik.

Konsep-konsep kepemimpinan yang dipraktekkan oleh Umar bin Abdul Azis jauh dari kesejahteraan pribadi. Itu artinya, sebagai seorang pemimpin, Umar tidak bertambah kaya. Ia juga tidak membawa keluarganya mendapatkan otoritas dari jabatannya. Tidak hanya itu, bahkan anaknya sendiri pernah mengeluh bahwa posisi khalifah selaku pemimpin umat Islam tidak memberikan keuntungan individualis (Khoeroni, 2015). Pertanyaanya, apakah konsep seperti ini relevan dipraktekkan zaman sekarang, atau justeru menjadi destruksi bagi kader-kader yang berminat terjun di panggung politis.

Menjadi pemimpin dalam suatu negeri adalah nama lain dari ‘berkuasa’. Para intelektual menyebutkan bahwa nafsu yang paling tinggi adalah keinginan untuk berkuasa. Maka tidak heran jika kontestasi ini selalu ramai dan digandrungi berbagai kalangan. Tidak hanya itu, nikmatnya panggung kekuasaan acap kali membuat pelakunya tidak puas menjabat hanya dalam satu periode. Pasti ada upaya untuk melanjutkan batas minimal ke

durasi maksimal jika regulasi tidak membatasinya (Suherman, 2019). Kenyataan ini secara sistematis membuat dinamika politik semakin panas dan tidak terkendali. Akibatnya terjadi gesekan di sana-sini, bahkan tidak jarang terjadi permainan kotor demi mendapatkan atau memperoleh kekuasaan.

Bila sedemikian lezatnya momentum berkuasa, tentu berbeda paradigma dengan apa yang dialami Umar bin Abdul Azis di masanya. Bahkan, proses wafatnya Umar sendiri diduga diracuni oleh keluarganya. Ini membuktikan, bahwa pihak keluarga tidak senang dengan konsep kepemimpinan yang dijalankan Umar. Begitu juga dengan gaya Umar berkuasa, hampir seluruh staf dan pekerja di pemerintahan, memundurkan diri karena dianggap tidak memiliki nominal gaji yang layak (setara buruh) (Khairuddin, 2018). Menimbulkan pertanyaan lanjutan, apakah yang dilakukan Umar adalah sebuah solusi untuk bangsa, atau masalah baru yang mendzalimi pekerja. Hal tersebut menjadi menarik untuk dikaji apalagi jika dibandingkan dengan kepemimpinan masa sekarang.

Berbicara literatur yang sudah ada, sejauh pengamatan penulis, sudah banyak yang mengkaji konsep kepemimpinan yang dipraktekkan oleh Umar bin Abudl Azis. Hal tersebut terbukti dari belum adanya karya ilmiah secara khusus yang dapat ditemukan (sejauh ini) kecuali informasi pemikiran Khairuddin Faiz (tentang Umar bin Abdul Azis) yang eksist dalam chanel youtube. Berdasarkan kenyataan di atas, maka penelitian terkait kepemimpinan ideal Umar bin Abdul Azis yang dielaborasikan dengan realitas modern belum pernah dikaji dan diteliti secara koherensif. Menunjukkan bahwa artikel ini memiliki keunikan dan novelty.

B. Metode Penulisan

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Format metodologi yang digunakan adalah studi deskriptif analisis (Rawan, 2000). Sumber primer dalam penelitian ini adalah gagasan yang dikemukakan oleh Khairuddin Faiz tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Azis yang ada pada chanel youtube yang berjudul 'Ngaji Filsafat'. Adapun mengapa konten youtube dijadikan sumber primer, adalah karena informasi terkait variabel penelitian paling banyak ditemukan di dalamnya.

Adapun sumber sekunder adalah data-data pendukung terkait 'pemimpin ideal' atau 'Umar bin Abdul Azis' yang ditemukan pada publikasi ilmiah seperti jurnal dan buku. Metode analisis data yang dilakukan adalah dengan mengkombinasikan data primer dan sekunder dalam sebuah sekema yang saling mendukung dan timbal balik. Sebelum menyusun hasil penelitian dalam bentuk artikel, penulis memtakkan sub-sub data berdasarkan sub tema sebagaimana pemikiran Khairuddin Faiz yang paling dominan di youtube.

C. Biografi Singkat

Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang raja yang paling dikenal sebagai umar ke-2. Lahir pada tahun 682 H. Gelarnya menjadi raja sekitar 2 tahun 9 bulan. Sejak kecil, Umar Bin Abdul Aziz seorang anak yang sholeh serta gemar menuntut ilmu untuk mempelajari hal-hal tentang agama (Khairuddin, 2018). Dengan demikian bisa memiliki 33 orang guru, 8 diantaranya merupakan sahabat dan 25 lainnya adalah para tabi'in. Tidak hanya itu, Umar bin Abdul Aziz juga mengaji filsafat dengan tema tokoh-tokoh yang dikenal sebagai sejarah pemikiran.

Dilihat dari asal-usulnya, Umar bin Abdul Aziz bukan keturunan langsung dari raja-raja, tetapi masih dari keluarga raja-raja. Ayahnya berasal dari Dinasti Umayyah putranya Marwan bin Hakam Khalifah Umayyah ke-4. Marwan bin Hakam mempunyai dua orang anak yaitu Abdul Malik dan Abdul Aziz. Abdul Malik nantinya akan menjadi Khalifah Umayyah yang ke-5, beliau mempunyai anak yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik yang akan menjadi khalifah ke-6. Sebelum Sulaiman wafat sempat berwasiat kepada Umar Bin Abdul Aziz yang merupakan sepupunya untuk meneruskan tahta (Khairuddin, 2018).

Garis keturunan dari sang Ibu, Umar Bin Abdul Aziz ialah cicitnya Umar bin Khattab, beliau disebut sebagai Umar ke-2. Dari segi kualitas, Umar bin Abdul Aziz mirip dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mempunyai anak yang bernama Asim, lalu Asim mempunyai anak bernama Laila, kemudian Laila menikah dengan Abdul Aziz lalu mempunyai anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Ini menunjukkan bahwa istilah penamaan ‘Umar ke-2’ bukan hanya soal nama atau garis keturunan, lebih dari itu adalah bagaimana kiprah keduanya yang mampu memberikan perubahan besar meskipun menjabat dalam kurun waktu yang relative singkat (Yusup, 2020).

Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang Khalifah ketika berumur 36 tahun saat Khalifah Sulaiman tutup usia. Selama menjabat sebagai Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan pemimpin yang sangat bijaksana, adil, rendah hati dalam kepemimpinannya. Banyak kebijakan yang dilakukan untuk negeri. Umumnya seorang pemimpin apabila diberi kekuasaan akan merasa senang, namun berbeda dengan Umar bin Abdul Aziz yang menangis ketika diberi jabatan sehingga tampak sosok pemimpin yang tidak besar hati (Khairuddin, 2018). Masa pemerintahannya juga sungguh luar biasa karena pemimpin yang menjadi pelindung anak yatim dan kaum fakir miskin.

Pada waktu yang singkat beliau berhasil menjadikan ketentraman dan kenyamanan untuk rakyatnya. Masa dirinya menjabat sebagai pemimpin di bawah 3 tahun dan tutup usia pada tahun 720 H. Sejarah menyebutkan bahwa wafatnya Umar bin Abdul Azis karena diracuni oleh ajudannya sendiri atas perintah anggota keluarga. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Umar menyadari bahwa ia sudah diracuni. Pada sisa-siswa waktu itu, Umar masih sempat menyuruh ajudan yang menjadi ‘kaki-tangan’ pembunuhan untuk melarikan diri sejauh-jauhnya (Formanto, 2020). Hal tersebut dilakukan Umar, karena dia mengetahui bahwa hidup ajudannya tidak akan selamat meskipun bukan sebagai ‘otak utama’ pembunuhan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Umar masih saja memperdulikkan orang

lain padahal dirinya sudah dihianati. Tidak mungkin kemuliaan sikap seperti ini bisa ada dalam diri seseorang jika itu bukan dari pribadi yang baik yang menjadikan akhirat sebagai tujuan.

D. Prinsip Kepemimpinan Umar bin Abdul Azis

1. Pemimpin yang Ditunjuk bukan Menunjuk Diri

Pada konsep ajaran Islam, sering kali didengar istilah bahwa pemimpin sebaiknya ditunjuk bukan menunjuk. Artinya, pemimpin direkomendasikan oleh sahabat atau pihak lain yang melihat kapasitas dan potensinya. Apa yang terjadi pada masa khulafaur rasyiddin misalnya, sahabat masa itu semuanya ditunjuk oleh sahabat yang lain tanpa ambisi bahwa diri sendiri yang lebih layak (Zayyadi, 2020). Berbeda dengan kenyataan hari ini, hampir semua calon pemimpin adalah sosok yang ambisi untuk berkuasa, adapun jika ada yang tidak ambisi (ditunjuk), justeru sering kalah dalam kontestasi politik.

Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang Khalifah berawal dari Khalifah Sulaiman tutup usia. Ketika itu umur Umar bin Abdul Aziz 36 tahun, seluruh umat Islam di kota Damaskus berkumpul di suatu masjid menantikan pengganti khalifah. Penasihat kerajaan Raja' bin Haiwah segera berdiri dan membacakan surat wasiat Khalifah Sulaiman. ‘*Bangunlah wahai Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya nama engkau lah yang tertulis dalam surat ini,*’ ungkap Raja’. Ketika mendengar perkataan tersebut Umar terkejut, lalu segera bangkit dan dengan rendah hati berkata, ‘*Wahai manusia, demi Allah Swt. Sesungguhnya saya tidak pernah memohon perkara ini kepada Allah satu kalipun. Sesungguhnya jabatan ini diberikan kepadaku tanpa bermusuhan arah terlebih dahulu dan tak pernah aku memintanya. Sesungguhnya aku mencabut bai’at yang ada di lehermu dan pilihlah siapa yang kalian kehendaki.*’ Umat Islam yang berada di masjid menolak untuk mencabut bai’atnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz duduk sambil menangis, ‘*Alangkah besarnya ujian Allah kepadaku*’ (Khairuddin, 2018)

Berbagai literasi menyebutkan bahwa Umar masih saja belum siap untuk menerima tanggung jawab menjadi khalifah. Baginya, jabatan sebesar itu adalah ‘musibah’ karena dia khawatir tidak bisa berlaku adil dan merasa ‘setengah kaki pemimpin sudah di neraka.’ Ketika dirinya pulang ke rumah, di sanalah isterinya menguatkan Umar dan memotivasinya bahwa penunjukkan itu adalah amanah. Selanjutnya amanah sebesar itu tidak boleh disia-siakan karena banyak pihak yang percaya bahwa Umar adalah sosok yang ideal untuk menjadi khalifah masa itu.

Bukti bahwa Umar merasa bahwa ‘jabatan’ adalah musibah, adalah ketika terbesit secara spontan dari lidahnya saat ditunjuk sebagai khalifah. Ketika Umar mengembalikan *bai’at* untuk dipilih secara demokratis (bukan wasiat raja sebelumnya), semua kalangan tidak protes dan tetap konsisten bahwa Umar yang layak menjadi pemimpin. Saat itulah Umar mengucapkan; *Innalillahi wa innalillahi rojiun.* Tentu berbeda dengan kontestasi politik zaman sekarang, perkataan semacam itu hanya akan disebutkan justeru ketika kalah dalam pemilihan (Ningrum & Yuliawati, 2020). Sebaliknya, ketika diumumkan ‘pemenangan’ oleh

pihak penyelenggara, pemimpin hari ini akan loncat kegirangan merasa bahagia dan puas hati.

Apa yang terjadi di masa pemilihan Umar bin Abdul Azis adalah konsep yang sangat ideal bagi bangsa. Ketika seseorang tidak ambisi (menjadi pemimpin), menunjukkan bahwa ia tidak punya itikad buruk ketika menjabat. Sebaliknya, justeru Ia akan merasa takut jika saat memimpin mengecewakan hak dan keadilan masyarakat. Senada dengan apa yang dicetuskan oleh Qurais Shihab, menurutnya syarat menjadi pemimpin itu dua; *Pertama*, disukai masyarakat. *Kedua*, mampu menjadi pemimpin (Mukmin, 2021). Hal ini mewakili konsep demokrasi saat ini, dimana suara terbanyak dan kapasitas calon adalah indikator penting bahwa seorang itu mampu menjalankan roda pemerintahan.

Namun tetap saja, konsep yang ditawarkan dalam Islam berbeda jauh dengan perkembangan zaman saat ini. Masa kampanye misalnya, adalah bentuk ambisi dari calon sehingga rela berhutang ke mana-mana agar tercapainya kemenangan. Begitu juga dengan ‘kontrak politik’. Setelah terjadi berbagai kontrak yang menjerat di sana sini, menangpun akan menjadi pihak yang terkekang dengan kontrak sebelumnya. Inilah yang penulis analisa bahwa konsep pemilihan pemimpin seperti sekarang perlu untuk dievaluasi. Alasannya adalah karena pemimpin hari ini tidak bisa ‘merdeka’ menjalankan roda pemerintahan (Baharuddin et al., 2021). Hal itu adalah konsep yang berjauhan dengan apa yang diperaktekan Umar bin Abdul Azis yang menjadikan kemaslahatan sebagai tolok ukur dalam menjalankan kekuasaan.

2. Takut Pada Allah

Hal yang paling penting agar pemimpin itu ideal dan tidak keluar dari ridho-Nya adalah bagaimana pribadi seorang pemimpin merupakan individu yang takut kepada Allah Swt melebihi apapun (Zabir, 2018). Umar bin Abdul Aziz sangat takut kepada Allah, takut pada hari akhir, serta takut akan kemurkaan Allah Swt. Itulah alasan dibalik mengapa Umar awalnya menolak ditunjuk sebagai pemimpin, karena baginya menjadi pemimpin sangat beresiko menyimpang dan sebab didatangkan azab di hari kemudian.

Apabila seorang pemimpin dasarnya takut kepada Allah, dengan izin Allah dirinya tidak akan melakukan hal yang merusak, hal yang menyengsarakan orang yang di pimpin. Dengan demikian akan terbentuk suatu sistem pemimpin yang kuat. Begitulah keseharian Umar, ketika pagi hari dirinya melayani umat dan malam ari dirinya menjadi seorang Sufi yang senang berdua dengan Allah Swt, suka bermunajad sambil menangis, hal itu menjadikan hatinya lembut (Khairuddin, 2018). Ini menjadi petunjuk, bahwa apabila mencari seorang pemimpin, carilah yang takut kepada Allah Swt. Takut kepada Allah artinya dunia tidak membuat dirinya gentar dalam kondisi apapun.

Pada kehidupan modern, saat pemimpin main proyek, korupsi, nepotisme, dzalim, dan lain sebagainya; menunjukkan bahwa dirinya tidak menhadirkan Allah dalam hatinya. Itu artinya, pemimpin seperti ini tidak takut kepada Allah, sebab jika ia takut maka ia akan menyadari bahwa Allah maha tahu, dan Allah maha membala apa-apa yang dilakukan

selama hidup di dunia (Maulida, 2014). Pemimpin yang dzalim, bukan berarti mereka tidak tahu bahwa Allah maha tahu, namun kegelapan dalam dirinya (nafsu) telah membuyarkan pemikiran itu sehingga ia dihanyutkan oleh gemerlapnya kekuasaan. Maka jangan heran jika pemimpin kerap dengan scandal, karena memang jabatannya sangat mudah untuk terperosot dalam kesalahan.

Ketika Umar bin Abdul Aziz ditunjuk sebagai khalifah, dirinya mendatangi Hasan Basri untuk meminta suatu nasehat mengenai kepemimpinan. Hasan Basri merupakan seorang Sufi besar diaman saat itu. Ini menarik jika dibandingkan dengan pemimpin modern, saat ini, ketika pemimpin berkuasa maka bukan dirinya yang mendatangi ulama, sebaliknya meminta ulama untuk datang ke istana. Apa yang dilakukan Umar adalah bentuk keseriusan bahwa dirinya ingin menjadi pemimpin yang benar bukan sebatas mencari dukungan politis (Khumaidi, 2021). Bila masa Umar pemimpin mendatangi ulama setelah menjabat, masa sekarang, pemimpin akan mendatangi ulama sebelum pemilihan. Itu artinya, ulama dijadikan ‘alat’ agar oknum politis memperoleh dukungan jamaah. Terbukti, setelah memperoleh kekuasaan, pemimpin hari ini sering kali meninggalkan ulama dan bergerak sendirian.

Ketika Umar menemui Hasan Basri, Hasan Basri mengatakan bahwa pemimpin itu harus Adil. Allah Swt menjadikan kepala negara yang adil untuk meluruskan sesuatu yang miring, memperbaiki sesuatu yang rusak, memperkuatkan yang lemah, serta membela yang teraniaya. Itu merupakan hal utama yang menjadi sebuah prinsip dan komitmen dalam menjadi seorang pemimpin. Menjadi kepala negara yang adil itu dapat diibaratkan seperti seorang yang sedang mengembala binatang (Khairuddin, 2018).

Artinya sayang pada binatang gembalanya, menjadikan kawan yang mengantarkan gembala ke tempat yang jauh dari binatang buas, serta dapat memelihara dari panas maupun dingin. Hal utama yang diberi nasihat oleh Hasan Basri merupakan pemimpin yang adil, memperhatikan orang-orang yang lemah. Kemudian menjadi seorang pemimpin mesti bisa merawat, yaitu menampung, menerima, mengarahkan orang-orang yang dipimpin untuk selamat dunia maupun akhirat. Menjadi seorang pemimpin yang adil juga mesti dapat melindungi anak yatim dan dermawan dengam fakir miskin (Khairuddin, 2018). Dari peristiwa singkat Umar bin Abdul Aziz Bersama dengan Hasan Basri dapat diambil hikmahnya bahwa ketika berada dalam posisi diatas, jangan meninggalkan Ulama. Mesti mendengarkan nasihat-nasihatnya. Ketika menjadi pemimpin melibatkan Ulama, maka akan ada masukan-masukan yang berharga untuk mengatur sebuah Negara.

Nilai-nilai ‘takut pada Allah’ tidak hanya dipraktekkan Umar untuk dirinya, ia juga kerap memotivasi dan menasehati karyawannya agar bertindak dan bekerja secara benar. Sebagai contoh, ketika salah seorang pekerjanya di pemerintahan mengeluh akan padatnya job desk. Umar menasehati bahwa; lebih baik kita disibukkan oleh pekerjaan membantu umat, dari pada nanti disiksa karena banyak waktu yang lalai dalam membiarkan umat terbengkalai (Habibullah et al., 2022). Begitu juga ketika anaknya Umar protes terkait waktu libur ayahnya yang tidak ada lagi untuk keluarga. Umar mengatakan bahwa; “Apakah

anakku lebih takut kalau ayah tidak ada waktu untuk keluarga atau lebih takut jika ayah disiksa di hari pembalasan?”

Pada momentum yang lain, Umar menurunkan pajak yang terlalu tinggi untuk kaum non-Muslim. Umar memerintahkan gubernur yang zonasinya di wilayah basis non-Muslim untuk merevisi pajak, bahkan kalau bisa menghapuskan beban pajak bagi mereka (non-Muslim) yang mualaf (Tanjung, 2017). Tentu saja kebijakan ini ditolak keras oleh pejabat setempat, namun Umar bersikeras; “*Dahulu Nabi berdakwah agar orang berbondong-bondong masuk Islam, apakah kamu tidak takut jika ‘urgensi’ dakwah itu justeru kamu lakukan untuk mengutip pajak mereka.*” Menyikapi ini, para gubernur yang keras kepala menjadi takut, bahkan mengikuti keputusan Umar. Maka tidak heran jika masa pemerintahan Umar diklaim sebagai era yang sangat sejahtera dibandingkan khalifah-khalifah sebelumnya.

3. Bersikap Wira'i

Seorang pemimpin tentunya memiliki sikap kepemimpinan yang berbeda-beda. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pemimpin yang memiliki sikap *wira'i* yaitu sikap atau perilaku hati-hati terhadap hal-hal yang makruh dan hal-hal yang syubhat. *Wara'i* dalam bahasa sufi merupakan *wara'*. Dalam Ilmu Tasawuf, *wara'* merupakan kondisi jiwa yang hati-hati. Ilustrasi dari kehati-hatian merupakan orang yang menjauh dari yang makruh dan yang syubhat. Makhruh dan syubhat memiliki arti yang berbeda. Makhruk merupakan sesuatu yang boleh dikerjakan namun lebih baik ditinggalkan. Sedangkan syubhat merupakan sesuatu yang tidak jelas baik buruknya (Khairuddin, 2018). Kenyataan oknum pemimpin hari ini, jangankan perkara yang ‘subhat’, sesuatu yang jelas ‘keharamannya’ saja masih sering dipraktekkan bahkan candu dengan kondisi tersebut.

Orang yang memiliki sikap *wira'i* tidak hanya yang haram di tinggalkan tetapi syubhat juga ditinggalkan karena takut timbul akan kekhawatiran orang tersebut tentang baik dan buruk. Makruh ditinggalkan karena hukum makruh itu lebih baik ditinggalkan. Hal tersebut merupakan sikap Umar bin Abdul Aziz (Khairuddin, 2018). Contoh karakter *wira'i* pernah dipraktekkan oleh Abu Bakar Siddiq. Saat itu, Abu Bakar diberikan makanan oleh anak-anak, dan Ia pun memakannya. Setelah memakannya, Abu Bakar kemudian berfikir; “Dari mana anak itu memperoleh makanan? Apakah itu diperoleh secara halal atau karena mencuri?” Pada akhirnya, karena anak itu sudah tidak di sisi Abu Bakar, Abu Bakar memuntahkannya demi menjaga masuknya sesuatu yang tidak jelas (subhat) dalam tubuh (Faza, 2018).

Realitas ini sangat penting jika dapat dipahami oleh sosok pemimpin modern, kisah Abu Bakar dapat dijadikan renungan bagaimana pemimpin harus menghindari perkara-perkara subhat sebagaimana pemanian proyek yang kerap akan muatan gratifikasi atau nepotisme yang tak terkendali. Mencegah makanan subhat yang masuk dalam tubuh, dapat ditakwilkan sebagai upaya kehati-hatian pemimpin dalam menerima atau memakan gaji yang diperoleh. Apalagi jika uang atau hadiah itu ditujukan atas motif tertentu seperti kontrak politik, suap, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, sikap *wira'i* yang ada pada Umar bin Abdul Aziz dapat dilihat dari seorang yang bertanya kepadanya; “Wahai amirul mukminin, diberi hadiah kan tidak apa apa, Nabi dulu juga pernah menerima hadiah.” Umar menjawab, “Ya, hadiah ketika zaman Nabi merupakan tanda orang berterima kasih atas segala yang diberikan oleh Rasulullah Saw (Khairuddin, 2018). Akan tetapi, Jika ada orang yang memberikan hadiah kepada saya, itu bukan hadiah, tetapi suap. Suatu saat nanti apabila orang tersebut butuh sesuatu pasti akan diungkit kembali”. Penggalan tersebut menunjukkan bahwa, Umar tidak bisa memutuskan secara pasti motif pemberian hadiah masa dirinya menjabat. Beda dengan Rasulullah yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Jibril. Bila itu Rasulullah, ketika ada *hidden mission*, maka beliau bisa langsung menegurnya sebagai peringatan dan pelajaran. Maka, ketika Umar berada pada kondisi yang sama, menolak hadiah karena menghindari subhat adalah pilihan yang mencerminkan pribadi *wira'i*.

Pada situasi yang lain, karakter *wira'i* Umar juga terlihat ketika dirinya memerintahkan pelayan untuk memasakkan air, lalu pelayan memasakkan air di dapur umum. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menyuruh pelayan tersebut untuk membayar setiap satu batang kayu bakar dengan satu dirham (Rohayati, 2020). Tentu saja, uang yang digunakan adalah uang pribadi Umar, bukan uang pelayan apalagi kas negara. Fenomena ini juga menjadi realitas yang berbeda dengan kebanyakan pemimpin modern. Hari ini, sering kali pemimpin suatu negara menyamakan antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan negara. Itu artinya, kebutuhan pribadi inklud dengan wewenang atau hak pelayanan seorang kepala negara. Sebagai contoh, tidak sedikit pemimpin modern, menggunakan kas negara untuk membeli baju hari-hari. Meskipun dalam prakteknya digunakan sebagai pakaian dinas, namun ketika masa jabatan berakhir, pakaian itu menjadi milik pribadi.

Selain itu, Amir bin Muhamir menceritakan bahwa ketika Umar bin Abdul Aziz hendak menyalakan lampu kantor. Maka ia hanya menggunakan saaat melaksanakan kebutuhan pekerjaan umat. Ketika urusan kaum muslimin selesai, maka akan dipadamkan dan segera menyalakan lampu milik pribadi. Hal tersebut dilakukan karena dirinya sangat berhati-hati dengan makruh serta syubhat. Lampu milik umum yang digunakan untuk kepentingan pribadi bisa saja hukumnya makhrub. Boleh digunakan tetapi lebih baik ditinggalkan (Khairuddin, 2018). Oleh karena itu, ketika urusan kaum muslimin selesai, maka segera dipadamkan dan menyalakan lampu miliknya. Peristiwa tersebut juga merupakan bukti bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin yang memiliki karakter *wira'i*.

Bila melihat apa yang dilakukan Umar di atas, mungkin sangat jauh bila dibandingkan dengan karakter pemimpin masa sekarang. Umar senantiasa berhati-hati agar tidak salah dalam menggunakan kas atau aset negara. Oknum pemimpin sekarang justeru berfikir sebaliknya; ‘Bagaimana cara bisa menggunakan kas negara untuk keuntungan pribadi.’ Hal tersebut banyak terlihat bahkan terbukti secara jelas dengan berbagai program dan pemeriksaan pihak BPK atau KPK. Baru-baru ini, penggunaan kas negara sering diistilahkan dengan ‘mencubit’ dana APBA atau APBN (Qodir, 2016). Itu artinya, secara

jelas oknum pemimpin baik dalam level lokal maupun nasional mengambil kas negara yang diketahui penggunaannya untuk yang bersifat individualis.

4. Berkarakter Egaliter

Secara sederhana, egaliter adalah istilah yang digunakan Khairuddin Faiz dalam menyebut karakter Umar bin Abdul Azis yang adil dan bijaksana. Egaliter di sini bermakna bahwa hakikat suatu hak itu pada dasarnya sama antara satu dan yang lainnya (Sofyan, 2022). Konsep itu terus diperaktekan Umar dalam tindak-tanduknya sebagai esekutif masa itu. Bila merujuk pada sifat Rasulullah Saw, beliau juga menunjukkan sifat yang egaliter. Salah satunya ketika Nabi berdagang ke negeri Syam bersama Maisarah. Meskipun Maisarah berstatus sebagai budak Khadijah yang mendampingi Rasulullah, Namun Nabi memperlakukannya secara setara. Ketika makan, Nabi makan bersama dengan Maisarah. Begitu juga ketika lelah, Nabi kerap menyuruh Maisarah istirahat atau bergantian jaga.

Bila melihat catatan sejarah, karakter egaliter Umar terletak pada situasi dimana Umar dekat dengan pembantu-pembantunya. Suatu ketika Umar berada dalam situasi dan kondisi yang panas, kemudian minta tolong kepada pembantunya untuk dikipas. Kemudian Umar dikipasi sampai ketiduran, tidak lama kemudian pembantunya juga ikut tertidur. Begitu pembantunya ketiduran Umar bangun lalu melihat pembantunya dan merasa kasihan. Akhirnya, Umar bergantian untuk ngipasi pembantunya. Setelah pembantunya sadar merasa tidak enak yang luar biasa dan meminta maaf (Khairuddin, 2018).

Merespon itu, Umar mengatakan; “Kita sama-sama manusia, engkau merasa panas sebagaimana aku merasakan panas. Aku hanya ingin membuatmu merasa nyaman sebagaimana engkau membuatku nyaman dengan kipas ini”. Perbuatan tersebut tidaklah hina apabila seorang Khalifah mengipasi pembantunya (Khairuddin, 2018). Hal tersebut justru dipandang mulia. Jadi karakter itulah yang ingin dikembangkan oleh Umar Bin Abdul Aziz. Orang kecil akhirnya semakin hormat. Jadi makna eligeter merupakan sebuah sikap yang memperlakukan kelompok, suku, serta agama apa saja dengan setara.

Pemimpin yang berkarakter egaliter itu memiliki kolerasi dengan sikap tawadhu, tawadhu merupakan sikap rendah hati. Tidak ingin terkenal serta menonjolkan diri. Sikap tawadhu bukan dilihat dari orang yang apabila sedang berjalan didepan banyak orang dirinya nunduk. Hal itu belum cukup untuk dikatakan memiliki sikap tawadhu. Tawadhu merupakan suatu situasi ketika orang tidak mau menonjolkan diri, tidak menyombongkan diri, serta tidak pamer (Natanael et al., 2020). Suatu ketika Umar khutbah, Umar merupakan anak yang pintar, ketika orasi bagus. Saat khutbah membahas tentang siksa neraka banyak orang menangis. Ketika khutbah Idul Fitri sangat indah, banyak jamaah yang terhanyut, serta beberapa jamaah menangis karena terharu. Umar merasa heran mengapa para jamaah bisa menangis, lalu Umar berhenti dan mengakhiri khutbahnya.

Setelah umar mengakhiri khutbahnya, salah seorang pejabat istana bertanya, mengapa khutbahnya diakhiri, padahal masih banyak yang ingin mendengar kelanjutannya. Ternyata Umar khawatir bahwa nanti ketika jalan pulang Umar disambung, dibangga-

banggakan. Umar tidak suka dipuji-puji. Sikap itu membuat para rakyatnya sangat mencintai Umar. Suatu ketika salah satu rakyat Umar berkata apabila Umar tutup usia akan berusaha untuk memakamkannya di dekat makam Rasulullah Saw. Umar tidak menginginkan hal tersebut, Umar berkata kepada rakyatnya bahwa dirinya tidak semulia itu. Tidak layak untuk dapat kehormatan sebesar itu (Khairuddin, 2018).

Dirinya merasa malu ketika menghadap Allah akan disetarakan dengan Rasulullah Saw. Karena dirinya merasa bahwa banyak dosa-dosa yang belum diampuni Allah Swt. Hal tersebut merupakan sikap tawadhu yaitu sikap seorang pemimpin yang tidak suka pamer, tidak suka menunjukkan kelihaiannya, kemahirannya, serta kebesarannya. Sebagai umat muslim, karakter yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz mesti dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (Rohayati, 2020). Dimana Umar memiliki sikap yang tidak ingin di sanjung-sanjung oleh manusia. Berdasarkan peristiwa Umar, dapat dilihat bahwa seorang pemimpin dapat menyatu dengan rakyat, dengan merendah tidak akan membuat seseorang menjadi hina justru semakin mulia.

Beberapa kutipan terkait karakter ‘rendah hati’ Khairuddin Faiz sepertinya sedikit banyak terpengaruh dengan perangai Umar bin Abdul Azis. Pada beberapa kesempatan, saat mengisi materi di Ngaji Filsafat, Khairuddin Faiz sering mengatakan bahwa kita seharusnya malu jika hendak menerima syafaat Rasulullah Saw. Adapun alasannya adalah karena Rasulullah adalah manusia agung sedangkan kita adalah manusia yang selalu lalai, lupa, dan kerap bertolak belakang dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Pada kesempatan yang lain, Khairuddin Faiz juga menegaskan bahwa Rasulullah pernah meminta kepada sahabat bahwa Ia tidak ingin dipuja atau dipuji berlebihan. Meski begitu, sebagai seorang manusia yang mendapat syafaatnya, sudah selayaknya memuliakan Nabi meskipun beliau tidak ingin dipuji.

Bila pemikiran Umar di atas dikaitkan dengan kenyataan modern hari ini, maka itu dapat menjadikan pemimpin sebagai teladan yang dihormati dan disegani. Kenyataannya, sering kali oknum pemimpin merasa tinggi hati, apa yang dicapainya seolah-oleh adalah kemampuan mutlak tanpa ada dukungan atau peran pihak lain. Belakangan ini, ‘politik rendah diri’ semakin populer di Indonesia. Ini adalah *design* politik, dimana pelakunya mencoba melebur di tengah masyarakat dengan mengikuti berbagai kegiatan kalangan bawah (Putri et al., 2020). Gaya blusukan Presiden Jokowi misalnya, mampu meraup simpatisan masyarakat bahkan memenangkan kontestasi Pilpres hingga dua priode.

Terlepas apakah yang dilakukan Jokowi adalah modus maupun realitas, namun secara realitas karakter ‘tawadhu’ nya menginspirasi banyak orang khususnya kalangan bawah. Itu mungkin yang menyebabkan lawan politik kesulitan untuk menyalipnya. Ketika Jokowi mampu untuk turut ke selokan, turun ke sawah-sawah, turun ke pasar dalam menyatu dengan masyarakat, lawan Pilpresnya masa itu belum tentu mampu karena berasal dari elite politik dan elit penguasa. Bukan berarti ini menunjukkan keberpihakan penulis terhadap satu kandidat, namun ini bukti bahwa ‘politik rendah hati’ masih populer dan disukai masyarakat Indonesia.

Salah satu karakter egaliter yang dipraktekkan Umar lainnya adalah bagaimana Umar ingin gaji buruh ditingkatkan. Masa itu, terjadi perdebatan besar antara Umar dan bendahara negara. Umar ingin menaikkan gaji buruh setara dengan gaji pejabat negara, namun bendahara mengatakan bahwa kas negara tidak cukup untuk itu (Sofyan, 2022). Selanjutnya, Umar berinisiatif bahwa jika gaji buruh tidak bisa dinaikkan, maka gaji pejabat negara yang harus diturunkan sehingga sama dengan pendapatan buruh. Kebijakan Umar tentu tidak bisa diterima oleh pejabat, pada akhirnya hampir semua pejabat negara memundurkan diri karena tidak ingin bekerja dengan gaji rendah.

Umar tidak menyesal dengan keputusan mayoritas bawahananya yang *resign* dari pekerjaan. Selanjutnya Umar membuka *open recruitment* dengan keterangan bahwa gaji pejabat hanya sebatas buruh. Umar menyebutkan panggilan pekerjaan itu bukan untuk bersuka-ria, namun bagaimana ia memotivasi rakyat bahwa Ia membutuhkan orang-orang yang tulus bekerja membangun negara. Kebijakan itu sangat efektif, selain Umar dapat mengeleminasi pejabat yang ‘matre’, ia juga memperoleh pekerja yang tulus membangun negara walau dari kalangan bawah (buruh) (Hardjaloka, 2016). Logikanya, jika memang gaji pejabat setara buruh, maka kalangan bawah saja yang bersedia bekerja dengan suka cita. Ini salah satu alasan mengapa sistem administrasi dan managemen pelayanan umat masa itu sangat baik.

5. Bertambah Miskin Usai Menjabat

Salah satu bukti bahwa seorang pemimpin itu ideal adalah hasil kekayaannya pascamenjabat. Pada kenyataan modern, hampir semua pemimpin meningkat aset dan kekayaannya setelah berkuasa. Hal ini mungkin yang membuat politik menjadi candu bagi banyak kalangan. Maka tidak heran, jika ada calon pemimpin yang sudah kalah berkali-kali tetap mencoba sampai titik darah penghabisan (Abda, 2021). Konon lagi calon yang berhasil menjabat, akan sangat sulit baginya untuk berpuas hati untuk tidak mengikuti lagi pemilihan selanjutnya.

Suatu ketika, anaknya protes kepada Umar karena Umar merupakan keriteria pemimpin yang sangat berhati-hati. Umar berspektif bahwa Allah melihat segala sesuatu yang manusia perbuat sehingga hal itu yang membuatnya berhati-hati dalam memimpin. Pada umumnya keluarga kerajaan hidup dengan makmur, semua fasilitas terjamin. Akan tetapi hal tersebut berbeda saat masa kekhilafahan Umar. Ketika Umar menjadi pemimpin, dirinya hidup sangat sederhana. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz hartanya dikembalikan semua ke Negara. Bahkan kedua harta keluarganya juga diminta untuk dikembalikan ke Negara (Khairuddin, 2018). Hal tersebut yang menyebabkan umurnya pendek karena di racuni oleh salah satu kerabatnya sendiri karena ada yang tidak suka dengan kebijakan mengembalikan harta yang dulunya milik kas negara.

Bila dikaitkan dengan masa kepemimpinan Indonesia, sangat jarang ada yang berfikir untuk membayar hutang negara. Adapun alasannya karena hutang yang dipinjam untuk negara, tidak diwajibkan oleh pemimpin masa itu untuk membayarnya. Akibatnya,

akan ada niat untuk meminjam karena yang akan menggantikan adalah pemimpin selanjutnya. Tercatat, hanya dua pemimpin yang pernah mencoba membayar hutang NKRI semasa menjabat, mereka adalah Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan BJ. Habibie.

Pada kisah Umar bin Abdul Azis bisa menjadi contoh, ia berusaha mengembalikan apa-apa yang milik negara meskipun statusnya adalah fasilitas bagi pemimpin. Tercatat bahwa ketika Umar belum menjadi khalifah ia memiliki kekayaan sekitar 8 Milyar, namun ketika ia berakhir memimpin (wafat), kekayaannya hanya 8 Jutaan saja (Khairuddin, 2018). Ini menunjukkan bahwa, saat Umar memimpin bukan mencubit dana negara, sebaliknya banyak uang pribadinya yang mengalir bagi kebutuhan ummat.

E. Penutup

Berbicara kepemimpinan ideal Umar bin Abdul Azis, terlihat dalam berbagai sikap dan kebijakannya dalam memimpin umat Islam, adapun yang paling kentara iantaranya; *Pertama*, pemimpin harus ditunjuk bukan menunjuk. Hal ini menyebabkan calon pemimpin tidak ambisius dan tidak menghalalkan segala cara agar memperoleh kemenangan. *Kedua*, pemimpin harus takut kepada Allah SWT. Apabila pemimpin takut kepada Allah, maka ia akan mawas diri dan hati-hati dalam menjalankan berbagai otoritas negara. Sikap takut kepada Allah ini yang kemudian menjadikan Umar memiliki karakter yang *wira'i* saat menjabat. *Ketiga*, bersikap egaliter. Adalah karakter Umar yang sangat mengedepankan konsep keadilan dalam berbagai aspek.

Apa yang diperaktekan Umar sangat efektif jika diterapkan pada pemerintahan modern. Hal tersebut bisa menjadi batu loncatan jika Indonesia misalnya ingin maju dan berkembang pesat. Kenyataan hari ini, konsep ideal hanyalah sebuah pajangan. Panggung politik kerap digandrungi oleh pemain kotor yang menghalalkan segala cara untuk menang. Mirisnya lagi, jika ada calon kandidat yang ‘baik’ dan mencerminkan karakter Umar, sangat kecil kemungkinan bisa menang, karena konsep demokrasi hari ini sering kali memenangkan pohon besar yang memiliki modal kuat meskipun kiprahnya buruk seperti mantan koruptor.

REFERENSI

- Abda, Y. (2021). Komunikasi Politik Ulama Dayah Tridisional Aceh (Studi Ulama Kabupaten Bireuen Dalam Menghadapi Pilkada 2019). *Jurnal Al-Fikrah*, 10(1), 23. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/76>
- Baharuddin, Khan, M. A., & Zulkarnain. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Komunikasi Publik dan Politik: Studi Deskriptif Pentingnya Syiar Dakwah dalam Keluarga. *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Budaya*, 12(2), 114–128. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v12i2.3595>
- Faza, A. M. (2018). Wawasan Hadis Nabi Tentang Wara’. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 1(2), 97–110. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i2.2060>

- Formanto, B. (2020). Model Kepemimpinan Islami Umar Bin Abdul Aziz Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Syariah. *Al-Misbah*, 1(2), 179–195.
<https://jurnal.umika.ac.id/index.php/almisbah/article/view/133>
- Habibullah, A. H., Muhammad, D. H., & Susandi, A. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Yang Terdapat Dalam Kisah Umar Bin Abdul Aziz. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 4(1), 29–44.
<https://doi.org/10.46773/muaddib.v4i1.245>
- Hardjaloka, L. (2016). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 403.
<https://doi.org/10.31078/jk928>
- Khairuddin, F. (Director). (2018, November 19). *Ngaji Filsafat 210: Umar Bin Abdul Aziz (The Philosopher King)* (Vol. 210). <https://www.youtube.com/watch?v=wvvr2c-SJuM>
- Khoeroni, F. (2015). Kharj: Kajian Historis Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6(2), 340–359.
<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1375>
- Khumaidi, M. A. (2021). Agama dalam Negara antara Teokrasi, Sekuler, dan Tamyiz. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(4), 553–556. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i4.15044>
- Maulida, A. (2014). Inkarus Sunnah dari Kalangan Muslim dalam Lintasan Sejarah. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 1(1), 21.
<http://dx.doi.org/10.30868/at.v1i01>
- Mukmin, A. (2021). Konsep Nasionalisme M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah. *Iqtishaduna*, 4(1), 541–569. <https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v6i1.427>
- Natanael, Y., Devi, M., Burhanudin, Y. A., & Nur, J. (2020). Measurement Invariance pada Indonesian Tawadhu Scale (ITS). *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*, 3(2), 71–86.
<https://doi.org/10.15575/jpib.v3i2.9373>
- Ningrum, N. P., & Yuliawati, Y. (2020). Terobosan dan Perubahan Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *At-Taibdhib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 8(1), 32.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3751>
- Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliaavia, M. V., & Nuriyah, S. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(2), 72. <https://doi.org/10.36451/j.isip.v17i2.46>
- Qodir, Z. (2016). Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus Dan Resolusinya. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2), 14.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/82>
- Rawan, P. (2000). *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktik Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. STIA LAN Press.
- Rohayati, D. (2020). Konsep Umar Bin Abdul Azis Dalam Pencapaian Tujuan Mendidik Anak. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(2), 71.
<https://doi.org/10.22373/equality.v6i2.7914>
- Sali, M. A. (2019). Distinction of Justice and Fairness during Umar bin Abdul Aziz's Reign. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 4(2), 127.
<https://doi.org/10.29240/ajis.v4i2.954>
- Sofyan, I. Y. (2022). Menilik Egaliter Hak Berpolitik Laki-Laki Dan Perempuan. *Jurnal Al-Tasyri'iyyah*, 2(1), 45.
- Suherman, U. D. (2019). *Pentingnya Kepemimpinan Dalam Organisasi*. 16.

- Tanjung, H. (2017). Analisis Kebijakan Pengelolaan Zakat Umar Bin Abdul Aziz Dan Relevansinya Di Indonesia. *Kasaba; Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 190–210.
<http://dx.doi.org/10.32832/kasaba.v10i2.2396>
- Wahyuni, R. (2019). Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam; Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Tahun 2014—2017. *Takammul; Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, 8(1), 19.
<http://dx.doi.org/10.22373/takamul.v8i1.4863>
- Wahyuni, S. (2021). Character Building Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Islam: Analisis Penafsiran Surat Abasa 1-10. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18(2), 127.
<https://doi.org/10.22373/jim.v18i2.10931>
- Yusup, M. (2020). Reaktualisasi Pemikiran Umar bin Abdul Aziz Dalam Manajemen Penganggaran Publik. *IQTISHADUNA*, 11(2), 80–87.
<https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v11i2.2705>
- Zabir, M. (2018). Kebijakan Pimpinan Dalam Memotivasi Kerja Pegawai Baitul Mal Aceh. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 2(1), 93–118.
<https://doi.org/10.22373/al-idarah.v2i1.3396>
- Zayyadi, A. (2020). Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 47. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3115>